

Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia pada Program Bina Keluarga

Lansia

(Studi Kasus pada Bina Keluarga Lansia Mugi Waras)



الإسلامية
الاندونيسية

NASKAH PUBLIKASI

Disarikan dari Skripsi guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial

Budaya Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Meygita Yohan Pratiwi

NIM. 15321060

Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom

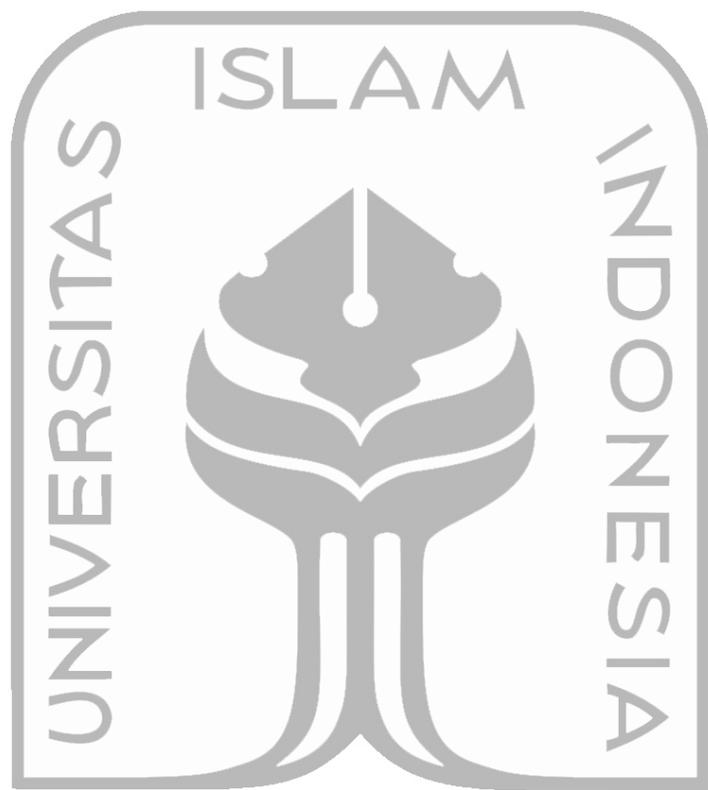
NIDN : 0520028302

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2019



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Naskah Publikasi

**Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia pada Program Bina Keluarga Lansia
(Studi Kasus pada Bina Keluarga Lansia Mugi Waras)**

ISLAM
Disusun Oleh :

Meygita Yohan Pratiwi

NIM. 15321060

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada 23 JUL 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,


Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom

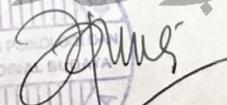
NIDN : 0520028302

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Puji Harivanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0529098201

**Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia pada Program Bina Keluarga Lansia
(Studi Kasus pada Bina Keluarga Lansia Mugi Waras)**

Meygita Yohan Pratiwi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Menyelesaikan Studi pada tahun 2019

Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom

Staff Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract:

The Special Region of Yogyakarta is a province with the highest proportion which is 13.90%. The highest number of elderly in Yogyakarta will certainly cause various problems for the elderly both physically, psychologically, socially and economically. Based on this phenomenon, the DIY National Population and Family Planning Board (BKKBN) runs an empowerment program for the elderly which is Bina Keluarga Lansia. In order to develop the empowerment program, the role of the facilitator is needed. In this study the researcher explained the role of the BKKBN as a facilitator in the empowerment program for senior citizen to develop elderly families (Bina Keluarga Lansia).

This study conducted qualitative research in particular descriptive study. The data were collected through observations, interviews and documentation. Based on the results of the study, BKKBN as a facilitator carried out several roles. Which are: assimilation with beneficiaries, mobilizing in order to make a changes, strengthening relationships with target communities, the role of education, the role of dissemination of innovations, facilitation roles, advocacy roles, supervision roles, monitoring roles and evaluation. Then, there are qualifications which should be fulfilled by the facilitator, which are: the facilitator already has good communication skills, the facilitator is proud of his/her profession, the facilitator has mastered the material, the facilitator also knows the background conditions of the beneficiaries and the facilitator is able to adjust the different socio-cultural characteristics of the community. There are three factors of success which should be carried out by the facilitator, which are the hard work shown by the facilitator; the facilitator always refers to the conditions, problems, and needs of the beneficiaries; the facilitator understand, feels and placing himself/ herself as the beneficiary. The supporting factors which found in this study were families support, communities, and the government that relate with this program, also provide appropriate media for this program. While, the inhibiting factors for this program are still a lack of facilities and infrastructure, also limited budget.

Keywords: facilitator, empowering the elderly, bina keluarga lansia

A. PENDAHULUAN

Salah satu fase kehidupan manusia yang akan dilewati adalah masa tua. Masa tua sering juga disebut dengan lansia. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Berdasarkan hasil dari data Susenas tahun 2017, jumlah lansia di Indonesia mencapai 8,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang mempunyai lansia dengan proporsi paling tinggi yakni 13,90 persen (Badan Pusat Statistik, 2017)

Tingginya jumlah lansia yang ada di Yogyakarta tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan pada lansia baik itu dari segi fisik, psikis, sosial maupun ekonomi. Melihat fenomena ini, perlindungan dan pemberdayaan lansia merupakan salah satu cara untuk membuat hidup para lansia lebih sejahtera.

Menurut Ife (dalam Anwas, 2014: 49) pemberdayaan adalah menyediakan sumber sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta ikut berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Setelah terlaksananya pemberdayaan terhadap lansia, diharapkan akan mengurangi permasalahan-permasalahan terkait lansia. Karena dengan adanya pemberdayaan, para lansia akan aktif, produktif dan mandiri.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia maka pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY menjalankan program pemberdayaan lansia yaitu Bina Keluarga Lansia atau disingkat dengan BKL. Bina Keluarga Lansia merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya (BKKBN, 2011: 10). Dalam program BKL sendiri didapati adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan, diantaranya: kegiatan keagamaan, kegiatan hidup sehat, dan kegiatan ekonomi produktif.

Deliveri (dalam Rinawati, 2009: 35) menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat harusnya didampingi oleh suatu tim fasilitator yang mengerti tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tim fasilitator yang memiliki peran sebagai pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Fasilitator sering juga disebut sebagai *agent of change* ataupun *agent of empowerment*.

Dalam perkembangannya, fasilitator hanya berperan sebagai penyampai inovasi dan memberi pengaruh kepada penerima manfaat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi ia juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga pemberdayaan yang bersangkutan (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 140).

Komunikasi kemudian berperan penting untuk mengukur keberhasilan fasilitator dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat menyampaikan inovasi ataupun informasi misalnya, tentu fasilitator perlu memperhatikan tata cara berkomunikasi. Hal ini diperlukan agar nantinya pesan yang disampaikan menjadi efektif dan dapat diterima oleh penerima manfaat. Dengan terjalannya komunikasi yang baik, besar kemungkinan sebuah kegiatan pemberdayaan menjadi berhasil.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan lansia, komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh fasilitator sehingga program yang dijalankan menjadi berhasil. Berangkat dari visi BKKBN yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, serta misinya yaitu mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan memfasilitasi pembangunan keluarga membuat penulis tertarik untuk menjadikan BKKBN sebagai objek penelitian. Terlihat bahwa BKKBN merupakan lembaga yang memang berfokus pada pembangunan kependudukan. Kenapa BKKBN DIY? Hal ini didasari pada data yang tersedia bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan lansia paling tinggi di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan kelompok Bina Keluarga Mugi Waras sebagai studi kasus penelitian dikarenakan kelompok ini adalah

kelompok yang dijadikan sebagai *Center Of excellent* oleh BKKBN. Di Indonesia sendiri, BKL Mugi Waras merupakan kelompok yang pertama kali dijadikan sebagai *Center Of Excellent* dikarenakan kegiatan dan prestasinya yang sangat banyak.

Melihat fenomena diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa saja faktor pendukung dan penghambat BKKBN DIY dalam melaksanakan program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BKKBN DIY sebagai fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BKKBN DIY program Bina Keluarga Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai peran fasilitator di sebuah program pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BKKBN DIY dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan peran fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan lansia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 5 jurnal yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Jurnal-jurnal ini memiliki kesamaan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian yang meneliti mengenai peran pekerja sosial dalam memberi pelayanan pada lanjut usia. Hasil dari penelitian ini ialah pekerja sosial berperan dalam memberikan pelayanan sosial terhadap lanjut usia sehingga lansia menjadi bahagia dan terhindar dari keterlantaran. Penelitian kedua meneliti tentang pemberdayaan kelompok lansia melalui optimalisasi peran kader posyandu lansia di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini ialah dengan mengoptimalkan peran kader posyandu lansia ada 104 lansia yang kemudian rutin untuk menghadiri kegiatan posyandu lansia dalam 3 bulan. 20 anggota keluarga meningkatkan partisipasinya untuk ikut mengoptimalkan kesehatan lansia.

Penelitian ketiga membahas tentang peran pendamping dalam program pendampungan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (*home care*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping menjalankan peran sebagai pemungkin, penggerak, mediator, dan motivator. Selanjutnya, penelitian keempat membahas tentang pemberdayaan lansia melalui Karang Werda di Desa Ngelegok Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya karang werda di lingkungannya, para lansia tadi kurang diperhatikan oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Setelah adanya karang werda para lansia merasa kesejahteraan hidupnya terjamin. Hal tersebut dirasakan karena adanya bantuan berupa fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis dan pemberian berupa bahan pokok yang diadakan secara berkala setiap bulannya. Penelitian kelima yang membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan lanjut usia di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah pemerintah sudah berperan dalam pemberdayaan lanjut usia yang meliputi beberapa kegiatan, diantaranya: pemberdayaan dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pemberdayaan pelayanan kesehatan, pemberdayaan pelatihan keterampilan, pemberdayaan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, dan pemberdayaan bantuan sosial.

2. Kerangka Konsep

a. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

1) Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memberikan fasilitas dan menggerakkan masyarakat untuk mampu menempatkan diri secara seimbang dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (Rinawati, 2009: 34).

2) Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (dalam Rinawati, 2009: 39) dimulai dari tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

a) Tahap penyadaran

Tahap penyadaran ini bertujuan agar masyarakat mempunyai “sesuatu”.

b) Tahap pengkapasitasan

Dalam proses pengapabilitas kepada manusia ini masyarakat diberikan pembelajaran sehingga mereka mempunyai kecakapan (*skilfull*). Sementara pengapabilitas terhadap organisasi dilakukan melalui restrukturasi.

c) Tahap pendayaan

Tahap terakhir dari proses pemberdayaan adalah memberikan “daya” (*empowerment*) itu sendiri. Dalam proses ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, dan otoritas.

3) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

- a) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
- b) Perbaikan usaha (*better business*)
- c) Perbaikan pendapatan (*better income*)
- d) Perbaikan lingkungan (*better environment*)
- e) Perbaikan kehidupan (*better living*)
- f) Perbaikan masyarakat (*better community*)

4) Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (PM) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan pengembangan masyarakat juga menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto, 2005: 37).

Conyers dalam Nasdian (2015: 32) menyatakan:

“Istilah pengembangan masyarakat (community development) sudah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses, yakni semua usaha swadaya masyarakat yang digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat dalam berbagai, antara lain: bidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk menyatukan seluruh masyarakat ke

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.”

b. Pemberdayaan Lansia

Pemberdayaan penduduk usia lanjut mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk usia lanjut sebagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis (Suardiman, 2006: 27).

Mengutip pendapat Pranarka dan Moelyoto dalam Suardiman (2006: 27) menyebutkan, dalam melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terlebih dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu *power* dan *empowerment*. *Power* adalah bagaikan bangunan dasar, sedangkan *empowerment* adalah bagaikan bangunan atasnya. Dengan demikian, *empowerment* perlu dilandasi *power*. Dalam pemberdayaan penduduk usia lanjut potensi objektif usia lanjut diibaratkan merupakan *power* yang dijadikan dasar pemberdayaan.

c. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh para pelaku pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin serta mempertimbangkan seluruh elemen pemilihan komunikator (penyuluh/fasilitator), Pesan (Pendidikan), Saluran, Komunikan (Masyarakat) serta Feedback (umpan balik).

d. Fasilitator dalam Pemberdayaan Lansia

1) Pengertian Fasilitator

Deliveri (dalam Rinawati, 2009: 35) mengatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat harusnya juga didampingi oleh suatu fasilitator yang bersifat multidisiplin. Fasilitator sebagai pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam kegiatan pemberdayaan. Peran tim pendamping akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Lippit dan Rogers (dalam Theresia, *et all.*, 2015: 174) menyebut fasilitator sebagai agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.

2) Ragam Penyuluh/Fasilitator

Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam beberapa bagian (UU No. 16 Tahun 2006), diantaranya:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai Penyuluh/Fasilitator.
- b) Penyuluh/Fasilitator Swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/benih/alat/mesin pertanian, dll). Termasuk dalam kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- c) Penyuluh/Fasilitator, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.

3) Peran Penyuluh/Fasilitator

Menurut Levin (dalam Mardikanto dan Soebinto, 2017: 140) ada tiga macam peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran.
- b) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.
- c) Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Lebih lanjut, Mardikanto (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 178) menyampaikan peran penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat yang disebutnya sebagai edfikasi, yaitu akronim dari:

- a) Peran edukasi, yaitu fasilitator berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan bersama penerima manfaatnya, dan terus menanamkan

pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya.

- b) Peran diseminasi inovasi, yaitu peran penyebarluasan informasi/inovasi dari “luar” kepada masyarakat penerima manfaatnya, atau sebaliknya; dan dari sesama warga masyarakat kepada warga masyarakat yang lain (di dalam maupun antar sistem sosial yang lain).
- c) Peran fasilitasi, fasilitator disini berperan sebagai pemberi kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- d) Peran konsultasi, yaitu fasilitator berperan sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain.
- e) Peran advokasi, fasilitator berperan untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan rumusan/pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaat (terutama bagi kelompok kelas-bawah).
- f) Peran supervisi, fasilitator berperan sebagai supervisor pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat.
- g) Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi, fasilitator berperan untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan berlangsung maupun pada saat sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.

4) Kualifikasi Penyuluh/Fasilitator

Setelah melihat peran-peran yang harus dijalankan oleh penyuluh/fasilitator, Berlo (dalam Soebiato dan Mardikanto, 2017: 143) mengemukakan ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh/fasilitator, antara lain:

- a) Kemampuan berkomunikasi

Dalam poin ini, yang terpenting ialah kemampuan dan keterampilan penyuluh/fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaatnya.

- b) Sikap penyuluh/fasilitator, yang: menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat itu memang sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaatnya.
- c) Kemampuan pengetahuan penyuluh/fasilitator tentang: isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya dan segala sesuatu yang seringkali menyebabkan warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat seringkali cepat/lambat mengadopsi inovasi.
- d) Karakteristik sosial-budaya penyuluh/fasilitator
Keadaan latar belakang sosial-budaya (bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan) seringkali justru lebih banyak menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan.

e. Kunci Keberhasilan Penyuluh/Fasilitator

Menurut Rogers (dalam Theresia, *et al.*, 2015: 187) mengemukakan ada empat hal yang menjadi kunci keberhasilan penyuluh/fasilitator, yaitu:

- 1) *Change-agent efforts* atau kerja keras yang dilakukan oleh penyuluh/fasilitator.
- 2) *Client Orientation*, atau selalu mengacu kepada (keadaan, masalah, dan kebutuhan) penerima manfaat.
- 3) *Compatibility with client's needs* atau harus menyesuaikan kegiatannya dengan kebutuhan penerima manfaat.
- 4) *Empathy* atau bertenggang rasa, yaitu kemampuan memahami, merasakan, dan menempatkan diri sebagai penerima manfaatnya.

f. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang bisa digunakan untuk mengukur S = *Strengths* (kekuatan-kekuatan yang dimiliki), W = *Weakness* (kelemahan yang ada), O = *Opportunities* (peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh), dan T = *Threats* (ancaman-ancaman yang bisa ditemui) (Cangara, 2014: 106).

Dari empat komponen ini, komponen kekuatan dan kelemahan berada dalam ranah internal organisasi. Kedua komponen ini erat hubungannya dengan sumber daya dan manajemen organisasi, karena itu disebut sebagai asesmen internal organisasi. Sedangkan komponen peluang dan ancaman berada dalam ranah eksternal organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Hidayat (dalam Salim, 2001: 42) menjelaskan bahwa paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap "*socially meaningful action*" melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial bersangkutan menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber primer berupa hasil observasi dan wawancara serta berdasarkan sumber sekunder yakni dokumentasi dan buku-buku.

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Beralamat di Jl. Kenari No.58, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan narasumber Kepala Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak & Ketahanan Keluarga Lansia, Widyaiswara, Penyuluh KB (PLKB) Kecamatan Moyudan dan Ketua BKL Mugi Waras. Analisa data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan juga dilakukan triangulasi data untuk memvaliditasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Peran Fasilitator dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bina Keluarga Lansia

a. Analisis Konsep Peran Fasilitator Menurut Konsep Levin

1) Pencairan Diri dengan Masyarakat Sasaran

Tindakan atau sikap yang pertama kali ditunjukkan oleh fasilitator kepada masyarakat sasaran akan berdampak signifikan pada kelangsungan program yang akan dijalankan. Ketika fasilitator mampu memberikan kesan pertama dengan sikap yang baik, tidak menutup kemungkinan program yang ditawarkan fasilitator akan diterima oleh masyarakat sasaran. Di kasus lain, Fasilitator juga tidak enggan untuk menceritakan pengalamannya perihal merawat lansia. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat masyarakat sasaran lebih di anggap dalam proses pemberdayaan yang berlangsung. Mencairkan diri dengan masyarakat sasaran juga dilakukan fasilitator dengan cara menjadikan dirinya sebagai sarana tempat curhat. Saat diadakan pelatihan pun fasilitator melakukan pencairan diri dengan masyarakat sasaran. Hal yang biasanya dilakukan fasilitator ialah dengan melakukan ice breaking.

2) Menggerakkan Masyarakat untuk Melakukan Perubahan

Cara awal yang dilakukan fasilitator untuk menggerakkan masyarakat ialah dengan mengundang seluruh penerima manfaat dalam sebuah pertemuan yang akan menjelaskan tentang program Bina Keluarga Lansia tersebut. Tujuan diundangnya penerima manfaat ialah untuk diberikan pengarahan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program Bina Keluarga Lansia. Selain itu, kader-kader yang bertanggung jawab dalam program tersebut juga diberikan pelatihan berupa simulasi-simulasi yang diberikan oleh fasilitator. Pelatihan dilakukan agar kader-kader yang ada dapat membimbing penerima manfaat lainnya dalam menjalankan proses kegiatan pemberdayaan. Setelah fasilitator berhasil memberikan pengarahan beserta pelatihan kepada penerima manfaat, hal selanjutnya yang dilakukan oleh fasilitator ialah dengan melakukan monitoring.

Bersikap baik kepada penerima manfaat juga dilakukan fasilitator dalam rangka mengerakkan masyarakatnya untuk melakukan perubahan. Bersikap baik membantu fasilitator untuk membuat penerima manfaat menjadi tergugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang disarankan oleh fasilitator guna terjadinya perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, fasilitator berusaha untuk tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari penerima manfaat. Meskipun pengetahuan mengenai perawatan lansia yang dimiliki oleh fasilitator mungkin lebih banyak ketimbang penerima manfaat, fasilitator tetap mensejajarkan dirinya dengan penerima manfaat. Keduanya sama-sama belajar melalui proses yang mereka jalankan selama kegiatan pemberdayaan berlangsung.

3) Pemantapan Hubungan dengan Masyarakat Sasaran

Pemantapan hubungan dilakukan fasilitator dengan melakukan pembinaan secara rutin. Semakin sering fasilitator menemui penerima manfaat, maka hubungan yang terjalin akan semakin erat. Adanya pembinaan secara rutin juga dapat membantu fasilitator untuk mengetahui kendala apa yang dialami oleh kelompok BKL. Dukungan operasional dapat membantu penerima manfaat dalam menjalankan program pemberdayaan. Adanya dukungan operasional juga membuat penerima manfaat lebih semangat dalam menjalankan program yang diberikan oleh fasilitator. Selanjutnya, hal yang dilakukan fasilitator untuk memantapkan hubungan dengan penerima manfaat ialah dengan menjadikan penerima manfaat sebagai keluarganya sendiri. Selain itu, perlakuan seperti sentuhan fisik semisal usapan dibagian pundak maupun bagian punggung atau dengan memberikan pelukan juga dirasa sebagai kegiatan untuk memantapkan hubungan keduanya. Hal-hal tersebut dapat membuat adanya kedekatan secara emosi dari kedua belah pihak.

2. Analisis Konsep Peran Fasilitator Menurut Konsep Mardikanto

a. Peran Edukasi

Pengembangan kelompok yang dilakukan dengan penerima manfaat diawali dengan dilakukannya sosialisasi kepada penerima manfaat. Masyarakat sasaran

diberitahu tentang pentingnya program ini bagi lingkungannya. Setelah itu, penerima manfaat diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung perkembangan kelompok pemberdayaan. Fasilitator juga sering menyelenggarakan lomba dan juga mengikutsertakan anggota kelompok BKLnya di dalam lomba tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mengembangkan Bina Keluarga Lansia tentunya.

b. Peran Diseminasi Inovasi

Fasilitator berperan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat penerima manfaat. Penyebarluasan informasi dilakukan ketika sedang diadakan pertemuan dengan penerima manfaat. Tidak hanya itu, Penyebaran informasi dan inovasi juga dilakukan dengan berbagai media. Seperti buku, aplikasi lansia tangguh, dan BKL KIT. Informasi yang biasanya disebarkan kepada penerima manfaat ialah informasi mengenai konsep lansia tangguh, kebijakan pembangunan keluarga, dan tujuh dimensi lansia tangguh.

c. Peran Fasilitasi

Fasilitator berusaha untuk terus memberikan kemudahan bagi penerima manfaatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana kepada penerima manfaatnya. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh fasilitator meliputi: pengadaan alat atau media belajar (leaflet, poster, buku, modul, flip chart, BKL KIT) dan pendanaan. Sumber-sumber kemudahan yang ditunjukkan oleh fasilitator berhubungan dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh penerima manfaat maupun pihak pemangku kepentingan. Bisa dikatakan fasilitator mencoba untuk menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh yang sudah terjadi dilapangan ialah kebutuhan akan pendanaan. Menurut penerima manfaat, sumber-sumber kemudahan sudah didapatkan melalui fasilitator lewat pendampingan-pendampingan yang fasilitator lakukan.

d. Peran Advokasi

Fasilitator berperan dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat

penerima manfaat. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh fasilitator ialah mengusulkan anggaran untuk membantu kelompok BKL. Meskipun pada akhirnya saran yang diberikan oleh fasilitator pada saat pengambilan keputusan kebijakan oleh atasan tidak hanya didengar dan tidak direalisasikan, tapi fasilitator selalu mencoba di setiap tahunnya untuk mengusahakan agar usulan yang mereka ajukan dapat terealisasikan. Karena memang program ini adalah program yang bersifat vertikal. Semua keputusan berasal dari atas dan yang dibawah (fasilitator dan penerima manfaat) hanya mampu untuk menjalankan.

e. Peran Supervisi

Peran lain yang ditawarkan oleh fasilitator ialah sebagai pengarah dalam pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam penelitian ini, fasilitator memang menjadi pengarah, namun hanya di awal ketika awal mula sebuah program akan dijalankan. Ketika program tersebut sudah dijalankan dan dirasa penerima manfaat sudah mampu untuk menjalankan kegiatan tersebut, fasilitator menyerahkan sepenuhnya kepada penerima manfaat.

f. Peran Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dengan terjun kelapangan bertemu langsung dengan penerima manfaat. Selain itu monitoring juga dapat dilakukan dengan mengisi blangko yang diberi nama K/0 (K Nol), R/1 (R Satu), dan C/1 (C satu). Monitoring yang dilakukan oleh fasilitator diakui masih jauh dari kata maksimal. Dalam setahun, monitoring yang dilakukan oleh fasilitator hanya sebanyak empat sampai enam kali. Mengingat dalam setahun ada 12 bulan, maka monitoring yang dilakukan oleh fasilitator hanya setengahnya saja.

Ada tujuh peran fasilitator yang dijelaskan Mardikanto dalam konsepnya, yaitu: peran edukasi, peran diseminasi inovasi, peran fasilitasi, peran konsultasi, peran advokasi, peran supervisi, dan peran pemantauan beserta evaluasi. Namun, berdasarkan data yang peneliti dapatkan, hanya enam peran yang dijalankan oleh fasilitator pada penelitian ini. Peran yang tidak dijalankan oleh fasilitator ialah peran konsultasi.

Fasilitator mengaku bahwa penerima manfaat sudah mempunyai solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hal ini dikarenakan pendidikan yang dimiliki oleh penerima manfaat tidak terlalu terbelakang bahkan bisa dikatakan sudah tinggi. Kemudian, ada permasalahan yang memang diberikan solusinya oleh fasilitator, namun solusi tersebut sudah ada sejak pembentukan kelompok ini. Peran fasilitator sebagai pemberi nasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah merupakan peran penting yang seharusnya dijalankan oleh para fasilitator. Seperti yang dijelaskan Barker (dalam Suharto, 2017: 98) memberikan definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu penerima manfaat menjadi mampu untuk menangani tekanan situasional atau transisional.

3. Kualifikasi Fasilitator

a. Kemampuan Berkomunikasi Fasilitator

Dalam kasus ini, fasilitator sudah mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada penerima manfaatnya. BKKBN sebagai fasilitator memiliki standar kompetensi untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki. Terlebih lagi mereka merupakan pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai seorang fasilitator. Selain itu, fasilitator juga menerapkan tata cara berkomunikasi yang baik ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai fasilitator. Dalam penelitian ini, fasilitator juga memiliki kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat.

b. Sikap Fasilitator dalam Menjalankan Program Bina Keluarga Lansia

Menjadi fasilitator dalam program pemberdayaan merupakan sebuah tugas yang membanggakan. Hal ini dirasakan oleh Pak Rahmad selaku fasilitator yang ada di BKKBN. Fasilitator disini menjadikan profesinya sebagai sebuah passion yang dimana ketika seseorang menjalankan perkerjaan sesuai dengan passionnya maka pekerjaan itu akan lebih terasa mudah dan menyenangkan. Selain itu, fasilitator juga merasakan bahwa kehadirannya memang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Mengetahui kenyataan ini membuat fasilitator semakin senang karena dapat mentransferkan ilmu yang mereka punya dan dapat diterima dengan senang hati oleh penerima manfaat. Memberikan bantuan kepada penerima manfaat juga dilakukan

oleh fasilitator. Tidak peduli siang maupun malam, selagi fasilitator mampu mereka pasti akan membantu.

c. Kemampuan Pengetahuan Fasilitator

Kemampuan pengetahuan fasilitator meliputi pengetahuan tentang isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang ada di dalam inovasi yang disampaikan. Fasilitator sudah menguasai materi yang akan diberikan kepada penerima manfaatnya. Materi yang akan disampaikan kepada penerima manfaat didapatkan dari hasil TOT (*Training Of Trainer*) yang telah diikuti fasilitator. Kemudian fasilitator juga mengetahui mengenai kondisi latar belakang penerima manfaatnya. Setelah mengetahui bagaimana keadaan latar belakang penerima manfaatnya, fasilitator akan menyesuaikan perlakuan yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Lalu, fasilitator juga memiliki pengetahuan tentang kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Hal ini dikarenakan saat sebelum memulai program, fasilitator mencari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penerima manfaat.

Pengetahuan tentang sesuatu yang membuat penerima manfaat menjadi suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan juga dimiliki oleh fasilitator. Menurut fasilitator, suka atau ketidaksukaan penerima manfaat dapat dilihat dari ekspresi wajah dan bagaimana sikap penerima manfaat saat menerima kehadiran fasilitator. Kelompok BKL Mugi Waras menerima kehadiran fasilitator dengan baik dan ramah. Hal ini membuat fasilitator merasa kehadiran dan inovasi yang diberikan memang disukai dan dirasa penting oleh penerima manfaat.

d. Karakteristik Sosial-Budaya Fasilitator

Fasilitator dalam program pemberdayaan ini sudah cukup mengetahui keadaan latar belakang sosial-budaya penerima manfaatnya. Dengan mengetahui karakteristik sosial-budaya penerima manfaat tentu akan memudahkan penerimaan inovasi yang diberikan oleh fasilitator. Perbedaan latar belakang sering ditemui dilapangan. Perbedaan yang sering ditemui oleh fasilitator ialah perbedaan kepercayaan. Hal ini wajar mengingat di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama. Saat

membuka pertemuan atau kegiatan yang melibatkan penerima manfaat, fasilitator menggunakan bahasa yang universal dan menghindari penggunaan bahasa atau ungkapan yang merujuk pada satu agama. Fasilitator dalam program ini mencoba untuk tidak menggunakan bahasa asing yang sulit di mengerti oleh penerima manfaat. Mengingat lansia disini juga berperan sebagai penerima manfaat dan penggunaan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari juga digunakan oleh fasilitator dalam menyampaikan inovasi yang mereka berikan.

4. Kunci Keberhasilan Fasilitator

a. *Change Agent Efforts*

Kunci keberhasilan pertama yang dilakukan fasilitator ialah berusaha untuk memberikan inovasi kepada penerima manfaat. Usaha yang dilakukan fasilitator sebelum menyampaikan inovasinya yaitu dengan mengikuti pelatihan. Kerja keras fasilitator juga dapat dilihat dari usaha fasilitator untuk menunjukkan sumber kemudahan berupa fasilitas sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerjasama dengan instansi yang dapat mendukung jalannya program pemberdayaan. Usaha-usaha yang dilakukan fasilitator tentunya juga dirasakan oleh penerima manfaat. Keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL menjadi senang dan aktif mengikuti kegiatan yang ada di kelompok BKL tersebut. Bahkan keluarga lansia yang awalnya tidak memperbolehkan lansia untuk mengikuti berbagai acara, saat ini menjadi berpikiran terbuka dan memperbolehkan orang tuanya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di BKL Mugi Waras.

b. *Client Orientation*

Keberhasilan fasilitator yang kedua ialah fasilitator selalu mengacu kepada keadaan, masalah, dan kebutuhan penerima manfaat. Melakukan perubahan dilakukan fasilitator berdasarkan keadaan permasalahan yang terjadi pada penerima manfaat. Untuk mengetahui bagaimana keadaan, masalah dan kebutuhan penerima manfaat, fasilitator bekerjasama dengan pemerintah desa melakukan observasi terlebih dahulu. Data-data yang didapatkan akan membantu fasilitator dalam

memahami kondisi penerima manfaatnya. Selain itu, fasilitator juga melakukan monitoring untuk mengetahui keadaan, masalah dan kebutuhan penerima manfaat.

c. *Empathy*

Keberhasilan fasilitator yang terakhir ialah fasilitator mampu untuk memahami, merasakan dan menempatkan dirinya sebagai penerima manfaat. Adanya interaksi yang dilakukan antara fasilitator dan penerima manfaat memudahkan fasilitator untuk mengisi poin kunci keberhasilan yang satu ini. Penerima manfaat sering sekali mengutarakan keluhannya kepada fasilitator. Ini memudahkan fasilitator untuk dapat memahami kondisi penerima manfaatnya.

Salah satu kualifikasi fasilitator sebagai kunci keberhasilan tidak ditemukan peneliti pada fasilitator dalam program ini. Kunci keberhasilan tersebut ialah *compatibility with client's needs* atau harus menyesuaikan kegiatannya dengan kebutuhan penerima manfaat. Fasilitator belum mampu mencapai kunci keberhasilan ini dikarenakan program ini memang merupakan program pemerintah yang bersifat *top-down* atau bersifat dari atas kebawah.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan apa yang dimiliki program ini, kelemahan apa yang dapat diperbaiki, peluang seperti apa yang dimiliki program ini, serta ancaman apa yang sedang dihadapi oleh program ini.

a. **Strength (Kekuatan)**

Fasilitator mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan, fasilitator merasa bangga dengan profesi yang sedang dijalani, penggunaan media penyampai inovasi yang beragam dan tepat penggunaannya, adanya kader di kelompok BKL Mugi Waras yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan program pemberdayaan, adanya semangat dalam melakukan perubahan yang ditunjukkan oleh penerima manfaat dan banyaknya instansi pemerintahan maupun swasta yang tertarik dengan kelompok BKL Mugi Waras

b. Weaknes (Kelemahan)

Monitoring yang dilakukan oleh fasilitator masih kurang efektif, kurangnya fasilitas pendukung yang diberikan untuk kegiatan Bina Keluarga Lansia dan anggaran dana yang terbatas untuk kelangsungan program Bina Keluarga Lansia

c. Opportunity (Peluang)

Kerjasama dalam bentuk CSR dapat diusahakan oleh fasilitator untuk BKL Mugi Waras mengingat banyaknya pihak-pihak yang tertarik pada kinerja kelompok ini, masyarakat diluar keanggotaan Bina Keluarga Lansia Mugi Waras juga merasakan manfaat dari program ini, dan adanya dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk program Bina Keluarga Lansia

d. Threats (Ancaman)

Tidak menemukan generasi penerus kader penggerak seperti Ibu Djumanah yang memiliki semangat tinggi untuk menjalankan program Bina Keluarga Lansia.

6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Bina Keluarga Lansia Mugi Waras

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam program ini ialah adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga disini memberikan izin kepada lansianya untuk mengikuti program ini. Masyarakat penerima manfaat, kader, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar program juga mendukung kegiatan ini dengan menunjukkan penerimaan dan semangatnya dalam menjalankan program ini. Pemerintah yang mau bekerjasama dengan program ini karena memang program ini dapat menarik perhatian para pemangku kepentingan.

2) Media yang Tepat

Disediakannya media yang dapat menunjang program pemberdayaan ini menjadi salah satu faktor pendukung. Media tersebut ialah BKL KIT yang berisi seperangkat alat yang mewakili tiap tujuh dimensi lansia.

b. Faktor Penghambat

1) Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di program ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam jalannya program pemberdayaan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana masih dirasakan oleh penerima manfaat. Seperti tidak adanya BKL KIT yang dimiliki oleh BKL Mugi Waras sedangkan BKL ini sudah dijadikan sebagai Center Of Excellent.

2) Anggaran Dana yang Terbatas

Faktor penghambat selanjutnya ialah anggaran dana yang terbatas. Meskipun pemerintah tetap memberikan pendanaan pada program ini, tapi dana yang diberikan masih dirasa kurang untuk melanjutkan proses program pemberdayaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Adapun peran yang dijalankan fasilitator dalam penelitian ini ialah: a) Pencairan diri dengan penerima manfaat, dengan cara membaaur dengan masyarakat, bersikap baik, menjadikan dirinya sebagai sarana tempat curhat, dan melakukan *ice breaking* sebelum melakukan pertemuan/pelatihan. b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, dengan cara mengadakan sosialisasi, memberikan pengarahan dan pelatihan kepada kader, melakukan monitoring, dan menjalin hubungan baik dengan penerima manfaat. c) pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran, dengan cara melakukan pembinaan rutin, memberikan dukungan operasional,

- mengadakan pelatihan-pelatihan, menjadikan penerima manfaat sebagai keluarga, dan menerapkan ilmu-ilmu komunikasi dan psikologi di kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran-peran lain yang dijalankan oleh fasilitator antara lain: a) peran edukasi, dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya program, mengadakan pelatihan yang dapat mendukung perkembangan kelompok pemberdayaan, menyelenggarakan lomba dan juga mengikutsertakan anggota kelompok BKLnya di dalam lomba tersebut. b) peran diseminasi inovasi, dengan melakukan penyebaran informasi melalui pertemuan dan media pendukung, menghubungkan penerima manfaat dengan instansi yang mempunyai informasi terkait kebutuhan informasi yang dibutuhkan penerima manfaat. c) peran fasilitasi, dengan memberikan sarana dan prasarana kepada penerima manfaat berupa alat atau media belajar (leaflet, poster, buku, modul, flip chart, BKL KIT) dan pendanaan, menunjukkan sumber kemudahan dengan menggandeng mitra yang berkompeten di bidangnya. d) peran advokasi, dengan melakukan usulan anggaran kepada atasan dan berpihak kepada penerima manfaat. e) peran supervisi, dengan melakukan pengarahan kepada penerima manfaat saat memulai menjalankan program pemberdayaan. f) peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi, dengan melakukan kunjungan lapangan dan memberikan blangko K/0 (K Nol), R/1 (R Satu), dan C/1 (C satu) untuk diisi oleh penerima manfaat.
- c. Kualifikasi fasilitator yang dimiliki oleh fasilitator dalam penelitian ini, antara lain: a) kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh fasilitator, fasilitator sudah memiliki standar kompetensi dalam penyampaian informasi dikarenakan fasilitator merupakan PNS, menerapkan tata cara berkomunikasi yang baik, melakukan penyesuaian media komunikasi, mampu berempati dan berinteraksi dengan penerima manfaat dengan hadir dalam kegiatan yang dilakukan penerima manfaat. b) sikap fasilitator dalam menjalankan program, fasilitator bangga terhadap profesinya dan menganggap profesi tersebut merupakan passionnya, fasilitator percaya bahwa kehadirannya memang dibutuhkan oleh penerima manfaat, dan mampu untuk memberikan bantuan kepada penerima manfaat. c) kemampuan pengetahuan fasilitator, fasilitator menguasai materi yang akan disampaikan kepada penerima manfaat dan sudah mengikuti TOT (*Training Of Trainer*) terlebih dahulu, fasilitator mengetahui bagaimana kondisi latar belakang penerima manfaatnya dengan melakukan observasi sebelum membentuk

- program di lingkungan tersebut, fasilitator juga mengetahui suka atau tidaknya penerima manfaat terhadap program melalui ekspresi wajah yang diberikan penerima manfaat. d) karakteristik sosial budaya fasilitator, fasilitator mampu untuk menyesuaikan perbedaan karakteristik sosial-budaya yang ada di masyarakat.
- d. Tiga poin kunci keberhasilan fasilitator dijalankan oleh fasilitator. Pertama, kerja keras yang dilakukan oleh fasilitator berupa mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan kepada penerima manfaat. kedua, mengacu kepada keadaan, masalah, dan kebutuhan penerima manfaat dengan melakukan observasi dan monitoring baik sebelum dan sesudah melakukan program pemberdayaan. Ketiga, fasilitator berhasil memahami, merasakan dan menempatkan dirinya sebagai penerima manfaat dikarenakan penerima manfaat selalu mengutarakan keluhannya kepada fasilitator.
- e. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ini. Faktor pendukung yang ditemui ialah adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam program ini, kemudian disediakan media yang tepat guna untuk program ini. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui dalam program ini ialah masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, kemudian anggaran dana yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam program ini.

2. Saran Peneliti

a. Saran untuk mahasiswa

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana peran fasilitator dalam program Bina Keluarga Lansia. Peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana serta pendanaan pada program pemberdayaan lansia ini.

b. Saran untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY

Saran dari peneliti untuk BKKBN DIY untuk lebih sering lagi melakukan monitoring ke lapangan. Selain itu, peneliti juga berharap BKKBN DIY lebih memperhatikan terkait pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

c. Saran untuk pemerintah

Peneliti berharap agar pemerintah lebih mendukung program ini baik secara moril maupun materil mengingat program ini merupakan program yang dapat membantu lansia menjadi lebih sejahtera hidupnya. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan serta kreativitas dari tiap-tiap substansi yang terkait.



Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BKKBN. 2011. *Bina Keluarga Lansia*. Yogyakarta: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provisnsi DIY.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan & Strategis Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cangara, Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasdian, Tonny Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ratnawati, Emmelia. 2017. *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rinawati, Rini. 2009. *Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Suardiman, Siti Partini. 2016. *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Theresia, Aprillia, *et.al.* 2015. *Pengembangan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Aminatun, Siti & Chulaifah. "Peran Pekerja Sosial dalam Memberi Pelayanan Lanjut Usia", *Jurnal PKS*. Volume 14 (Maret, 2015), Hal: 107-122.

Puspitasari, Ramadhani Bondan & Arsiyah. "*Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo*," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 3 (September, 2015), Hal: 117-240.

Rosidah, Afiyatur, Lusiana Devika F.S, Rifqi Firda S. "*Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Werda di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*," *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Volume 43 (Desember, 2016), Hal: 127-134.

Widada, W., Asmuji, D. Indriyani, A. Joyowidono. "*Pemberdayaan Kelompok Lansia Melalui Optimalisasi Peran Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*," *The Indonesian Journal of Health Science*. Volume 4 (Desember, 2013), Hal: 42-48.

Widyakusuma, Nurnita. "*Peran Pendamping dalam Program Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Home care): Studi Tentang Pendamping di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara*," *Jurnal Informasi*. Volume 18 (Desember, 2013), Hal: 212-224.